

Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021

Ali Mauludi AC¹⁾, Fadllan²⁾, Fitri Nur Rahmawati³⁾

¹⁾³⁾Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

²⁾Institut Agama Islam Negeri Madura

Email : mauludiali94@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the effect of minimum wages, economic growth, HDI, and capital spending on poverty in East Java districts/cities in 2017 s/d 2021. Using a quantitative approach, this research uses multiple linear analysis methods assisted by Eviews 12. Secondary data of this research sourced from the Central Bureau of Statistics, Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, as well as other sources. This research shows the results that the minimum wage partially has a significant positive effect, while the HDI, economic growth, and capital expenditure variables have a significant negative effect on poverty in districts/cities in East Java. In addition, together the variables of minimum wages, economic growth, HDI, and capital expenditures have a significant influence on poverty in districts/cities in East Java with an effect of 99.3%

Keywords: Minimum Wages, Economic Growth, Human Development Index, Capital Expenditure

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari upah minimum, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2017 s/d 2021. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda dengan dibantu oleh Eviews 12. Data sekunder penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta sumber lainnya. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa upah minimum secara individual memberikan pengaruh positif signifikan, sedangkan variabel IPM, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal memberikan hasil negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu secara bersama-sama variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja modal memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan pengaruh sebesar 99,3%.

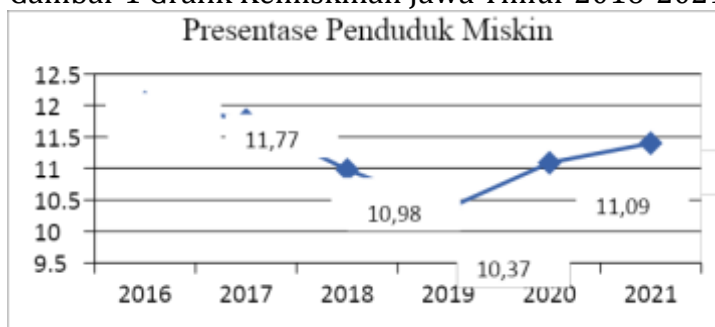
Kata Kunci: Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakatnya. Namun masih banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut termasuk diantaranya yaitu pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dibayangkan sebagai suatu kondisi dimana keluarga (individu) tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidup dasar seperti sandang, pendidikan, pangan, tempat berlindung, dan kesehatan.

Provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu Jawa Timur. Jawa Timur adalah provinsi yang terdapat di ujung timur pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Persentase kemiskinan di Jawa Timur tahun 2016-2019 selalu menunjukkan penurunan. Namun di tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan persentase kemiskinan dari yang sebelumnya 10,37% di tahun 2019 menjadi 11,40% tahun 2021. Sehingga pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mencapai 4.572.730 orang atau 16,6% dari seluruh penduduk miskin di Indonesia.

Gambar 1 Grafik Kemiskinan Jawa Timur 2016-2021



Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2022

Menurut Syamrilaode dalam Yanthi & A.A.I. N, menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu tingkat upah rendah, disparitas pendapatan, produktivitas tenaga kerja rendah, kurangnya kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya alam, etos dan motivasi kerja yang rendah, kultur budaya, dan kurangnya penggunaan teknologi.¹

Tingkat upah yang rendah menjadi satu dari berbagai aspek yang dapat menyebabkan kemiskinan. Karena tingkat upah rendah apalagi dibawah upah minimum menjadikan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Upah minimum adalah suatu kebijakan yang diciptakan pemerintah untuk membentengi daya beli masyarakat agar mampu memenuhi standar hidup minimumnya. Sungkar meyakini upah minimum menjadi salah satu kebijakan efektif untuk menekan kemiskinan karena akan memberikan distribusi pendapatan yang

¹ Yanthi C. I. D. P. & M. A.A.I.N., *Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah, Dan Pengangguran Terhadap Presentase Penduduk Miskin Di Kabupaten / Kota Provinsi* (Bali: Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2015), 11.

merata antara perusahaan dan pekerja.² Upah minimum Jawa Timur dari tahun ke tahun selalu menunjukkan adanya peningkatan. Persentase dan besaran upah minimum per tahun selalu bervariasi mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah.

Tabel 1 Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2021

Tahun	Upah Minimum	Persentase Kenaikan (Persen)
2015	Rp 1.000.000	-
2016	Rp 1.115.000	10,31
2017	Rp 1.388.000	19,66
2018	Rp 1.508.895	8,01
2019	Rp 1.630.059	7,43
2020	Rp 1.768.777	7,84
2021	Rp 1.868.777	5,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020

Selain upah minimum, pertumbuhan ekonomi juga diyakini mampu memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena PDRB menunjukkan jumlah nilai tambah akhir yang dihasilkan suatu wilayah dari seluruh unit usahanya. Untuk melihat pertambahan dari waktu ke waktu maka harus dinyatakan dalam nilai riil atau dalam harga konstan.³ Pertumbuhan PDRB Jawa Timur pada tahun 2016 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,5%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan laju pertumbuhan yang cukup drastis hingga laju pertumbuhan sebesar -2,39%. Jika dibandingkan dengan kemiskinan pada tahun 2020 tersebut juga terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan arah yang positif, namun kemiskinan masih mengalami peningkatan.

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur tahun 2016 – 2021

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
2016	1 405 563	5,57
2017	1 482 300	5,46
2018	1 563 442	5,47

² S. Sungkar, Nazamuddin N., & M. Nasir, *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia* (Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2015), 3.

³ A. Pangiuk, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013* (Ijtizam Journal of Shariah Economic Research, 2018), 2.

2019	1 649 896	5,53
2020	1 611 508	-2,33
2021	1 669 117	3,57

Sumber: BPS, Jawa Timur dalam angka 2022

Menurut Todaro dalam Safira, menyatakan meskipun pertumbuhan ekonomi tidak memberi jawaban secara otomatis terhadap berbagai macam permasalahan ekonomi dan kesejahteraan, namun pertumbuhan ekonomi masih menjadi unsur penting dalam pengentasan kemiskinan.⁴ Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) yang akan membangun berbagai peluang ekonomi dan kesempatan kerja sehingga menambah kesejahteraan masyarakat.

Selain upah minimum dan pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam upaya pemakmuran sebuah negara dan pengentasan kemiskinan. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat dilihat dari ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga komponen utama dalam penetapan IPM, yaitu pendidikan yang diwakili oleh angka harapan lama sekolah, kesehatan yang ditunjukkan dengan angka rata-rata harapan hidup, dan *Gross Net Income* per kapita untuk menggambarkan standar hidup layak.

Tabel 3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 - 2021

Tahun	IPM
2016	69,74
2017	70,27
2018	70,77
2019	71,50
2020	71,71
2021	72,14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

IPM Jawa Timur dari waktu ke waktu selalu menunjukkan peningkatan hingga pada tahun 2021 berada di angka 72,14 yang berarti masuk dalam kategori tinggi. Suatu daerah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi dan tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Budhijana yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.⁵

Selain pembangunan dalam kualitas sumber daya manusia, dalam mengatasi masalah kemiskinan yang kompleks dan meliputi berbagai sektor ini memerlukan kebijakan otonomi daerah dalam mengelola pengeluaran belanjanya. Sudah sepantasnya pemerintah daerah mengadakan perbelanjaan yang dapat menekan

⁴ Safira, S. Djohan & Nurjanana, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur* (Forum Ekonomi, 2019), 21.

⁵ Budhijana R. B., *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017* (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Perbankan, 2019), 5.

kemiskinan yang membelit sebagian masyarakat. Pemerintah daerah harus memberikan banyak atensinya pada pos-pos belanja yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan aturan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka pos-pos yang paling vital menyentuh langsung kesejahteraan rakyat salah satunya yaitu Belanja Modal.

Pengeluaran belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan seperti aset daerah, infrastruktur, sarana dan prasarana dasar di daerah. Investasi pada sektor barang modal ini sangat penting sebab dapat meningkatkan produksi dalam jangka panjang. Pada teori yang dikemukakan oleh Keynes dimana bahwasanya pengeluaran pemerintah dalam belanja publik yang relatif tinggi akan meningkatkan permintaan agregat dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi hingga pada waktunya juga akan mengurangi kemiskinan yang terjadi. Hal tersebut juga didukung oleh Sendouw, yang memberikan hasil belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja modal terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara individu maupun secara simultan.

Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Penduduk miskin yaitu penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. *Basic need approach* (kemampuan memenuhi kebutuhan dasar) digunakan sebagai indikator pengukur kemiskinan.

Jika diambil dua garis besar, kemiskinan di latar belakang oleh dua penyebab. Pertama kemiskinan alami yang timbul sebagai akibat keterbatasan pengetahuan dan teknologi sehingga tidak mampu mengolah sumber daya yang ada. Kedua yaitu kemiskinan buatan yaitu keadaan miskin yang disebabkan karena masyarakat secara umum tidak mampu menikmati sumber-sumber ekonomi karena dikuasai oleh struktur sosial tertentu (kemiskinan struktural). Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber daya ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷

Upah Minimum

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1999, yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Jika dilihat secara mikro, upah ditujukan

⁶ D. C. Sendouw, A. Rumat, A.V., & Rotinsulu, *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado* (Mando: Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2017), 18.

⁷ A. Kahar, *Beasiswa Pemutus Mata Rantai Kemiskinan* (Indonesia Emas Group, 2022), 54.

sebagai pengaman agar upah tidak merosot. Sedangkan secara makro, upah minimum bertujuan untuk pemerataan pendapatan, meningkatkan daya beli pekerja dan pelebaran kesempatan kerja. Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi besar kecilnya upah seperti permintaan penawaran TK., organisasi buruh, kemampuan bayar perusahaan, produktivitas, biaya hidup, pemerintah, keadilan dan kelayakan upah.⁸ Kebijakan upah minimum di Indonesia terwujud dalam adanya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan upah minimum didasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mempertimbangkan IHK, Inflasi, serta pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.⁹ Selain dinilai dengan skala nasional, pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada skala regional. Pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil). Karena pengaruh perubahan harga (inflasi) dihilangkan jika berdasarkan harga konstan, sehingga mampu menunjukkan pertambahan sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi.

Suatu perekonomian apabila jumlah produksi barang dan jasanya meningkat maka mengalami pertumbuhan ekonomi. Mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Karena dengan menggunakan harga konstan maka pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang atau jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan. Mengingat sulitnya mengumpulkan data PDB, maka penghitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat. Biasanya dilakukan dalam dimensi waktu triwulan dan tahunan. Cara menghitung tingkat pertumbuhan sederhana sekali. Jika selang waktu pertumbuhan hanya satu periode, maka:¹⁰

$$G_t = \frac{PDBRt - PDBRt-1}{PDBRt-1} \times 100 \%$$

Dimana:

G_t : Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan).

$PDBRt$: Produk Domestik Bruto Riil Periode t (berdasarkan harga konstan).

$PDBRt-1$: PDBR satu periode sebelumnya.

⁸ W. G. Wiryawan, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata*. (Media Nusa Creative, 2015), 125-128.

⁹ S. Sukirno, *Makroekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 65.

¹⁰ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 129-130.

Teori pertumbuhan ekonomi melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:¹¹

1. Teori Jumlah Produk Optimal (*Optimal Population Theory*);

Teori ini telah sangat lama dikembangkan oleh kaum klasik. Menurut teori ini, berlakunya TLDR (*The Law of Diminishing Return*) menyebabkan tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik (*Neo Classic Growth Theory*);

Teori ini dikembangkan oleh Solow merupakan penyempurnaan teori-teori klasik sebelumnya. Fokus pembahasan teori pertumbuhan Neo Klasik tentang akumulasi barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi.

3. Teori Pertumbuhan Endojenuis;

Teori ini dikembangkan oleh Rumer ini merupakan pengembangan mutakhir teori pertumbuhan Klasik-Neo Klasik. Teori ini mempunyai kelemahan model klasik maupun Neo Klasik yaitu terletak pada asumsi bahwa teknologi bersifat eksojenuis. Konsekuensi asumsi ini adalah terjadinya *The Law of Diminishing Return*, karena teknologi dianggap sebagai faktor produksi tetap (*fixed input*).

4. Teori Schumpeter;

Schumpeter berpandangan bahwa "pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Sebab, para pengusaha yang mempunyai kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru, dalam aktivitas produksi".

5. Teori Harrod-Domar;

Keduanya melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan *output*.

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri:¹²

1. Sumber daya yang dapat dikelola (*Invisible Resources*) sumber daya yang digunakan yang tidak dilarang oleh agama islam dan tidak membahayakan.

2. Sumber daya manusia (*human resources*) yaitu prinsip Islam terlihat berbeda dengan mainstream ekonomi konvensional yaitu hanya menekankan pada aspek kualitas profesional sedangkan kualitas moral diabaikan. Moral dianggap rangkaian yang hilang dalam kajian ekonomi maka Islam mencoba mengembalikan nilai moral tersebut. Menurut Islam untuk menjadi pelaku ekonomi yang baik, orang tersebut dituntut oleh syarat-syarat berikut:

¹¹ Rahardja dan Mandala Manurung, 139-143.

¹² Nf an, *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah*, 238-243.

- a. Suatu kontrak kerja merupakan janji dan kepercayaan yang tidak boleh dilanggar walupun sedikit.
 - b. Seseorang harus bekerja maksimal ketika ia telah menerima gaji secara penuh.
 - c. Dalam Islam kerja merupakan ibadah sehingga memberikan implikasi pada seseorang untuk bekerja secara wajar dan profesional.
3. Wirausaha (*entrepreneurship*), Merupakan M. Umer Chapra, dalam buku *Islam and Economic Development*, bahwa “salah satu cara yang paling konstruktif dalam mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan adalah dengan membuat masyarakat dan individu untuk mampu semaksimal mungkin menggunakan daya kreasi dan artistiknya secara profesional, produktif dan efisien”.

Teknologi (*Techonology*) dalam Islam mendukung kemajuan teknologi, perintah Al-Qur’an untuk melakukan pencarian dan penelitian cukup banyak dalam Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an juga ada perintah untuk melakukan eksplorasi segala apayang terdapat di bumi untuk kesejahteraan manusia.¹³

Indeks Pembangunan Manusia

Pada teori pertumbuhan baru modal manusia menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam upaya pemakmuran sebuah negara dan pengentasan kemiskinan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengukur taraf kesuksesan dalam pembangunan manusia yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga komponen utama dalam penetapan IPM, yaitu pendidikan yang diwakili oleh angka harapan lama sekolah, kesehatan yang ditunjukkan dengan angka rata-rata harapan hidup, dan *Gross Net Income* per kapita untuk menggambarkan standar hidup layak. IPM menjadi parameter kesuksesan pembangunan pemerintah yang mengukur apakah penduduk mampu menikmati berbagai fasilitas hasil pembangunan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber pendapatan.

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah / negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).
4. Menghitung indeks komponen

¹³ Ibid., 240-243.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*, 10-11.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:¹⁵

1. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{maks} - \ln(\text{pengeluaran})_{min}}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100 \%$$

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan utilitas lebih dari satu periode akuntansi.¹⁶ Belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah sebagai sarana pembangunan daerah. Bertambahnya belanja modal akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat, investor, pendapatan asli daerah serta merangsang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk pada masa yang akan datang.¹⁷

Pengembangan Hipotesis

Upah minimum merupakan jumlah upah terendah yang diberikan perusahaan. Marshall dalam teorinya menjelaskan bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja untuk meningkatkan nutrisinya yang dalam jangka panjang juga meningkatkan produktivitas kerjanya. Kenaikan upah juga

¹⁵ Badan Pusat Statisti (BPS) Jawa Timur, jatim.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab2, (diakses pada tanggal 20 September 2020 Pukul 20:07 WIB), 24.

¹⁶ A. Halim, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah* (Salemba, 2012), 121-130.

¹⁷ W. Ariadi, *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Dan Analisis* (Deepublish, 2021), 67-70.

kemungkinan tenaga kerja untuk memberikan nutrisi baik dan menyekolahkan anaknya. Adanya pendidikan dan kesehatan yang baik dalam jangka panjang kedua hal tersebut akan berdampak besar kepada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan serta penurunan kemiskinan.

H1: Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017 s/d 2021

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Peningkatan jumlah barang dan jasa yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi, membuat perusahaan menyerap semakin banyak tenaga kerja. Terserapnya tenaga kerja akan mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas serta pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut jika berlangsung terus menerus maka akan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Hal tersebut sering dikenal dengan teori *trickle-down effect* yang mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin.

H2: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017 s/d 2021

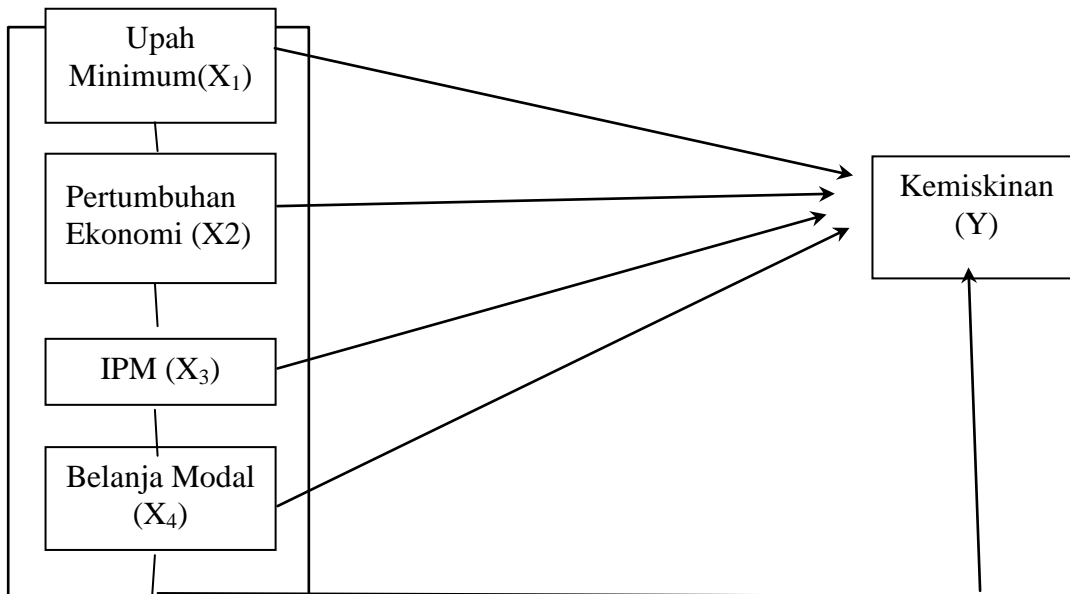
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Pada teori Lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Nurkse, sumber daya manusia memiliki andil besar dalam memutuskan rantai setan kemiskinan dan keterbelakangan. Keterbelakangan dapat diatasi melalui pembangunan manusia dari sisi meningkatkan pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, dan terpenuhinya standar hidup yang layak.

H3: IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017 s/d 2021

Bersumber dari teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), kemiskinan merupakan akibat sekaligus penyebab dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Belanja modal ialah pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk memperbanyak kekayaan dan aset tetap pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Apabila alokasi belanja modal pada pembangunan sarana dan prasarana semakin baik, maka kegiatan dan aktivitas perekonomian masyarakat suatu daerah menjadi lebih mudah dan lancar sehingga menaikkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk.

H4: Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017 s/d 2021

Gambar 2 Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu populasi data kemiskinan, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, IPM dan belanja modal dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan jenis data pada penelitian ini adalah data panel tahun 2017-2021. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari dokumentasi dari Laporan Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK Kemenkeu), serta dari sumber-sumber lain. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Operasional Variabel terikat penelitian ini yaitu kemiskinan dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam satuan ribu jiwa. Sedangkan variabel bebasnya yaitu upah minimum yang dihitung dalam satuan juta rupiah, variabel pertumbuhan ekonomi berupa PDRB Rill (ADHK) 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam satuan miliar rupiah, variabel IPM, dan variabel belanja modal berdasarkan realisasi belanja modal 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam satuan miliar rupiah. Skala yang dipakai pada penelitian ini adalah skala rasio

Analisis data penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang dibantu oleh software Eviews 12. Berikut merupakan bentuk persamaannya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

- Y = Jumlah Penduduk Miskin (dependent variable)
- X₁ = Upah Minimum (independent variable)
- X₂ = Pertumbuhan Ekonomi (independent variable)

- X3 = Indeks Pembangunan Manusia (independent variable)
- X4 = Belanja Modal (independent variable)
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Estimasi Model Regresi Data Panel

1. Common Effect Model (CEM)

Model ini merupakan model paling sederhana karena tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan data berperilaku sama dalam berbagai kurun waktu. Berikut merupakan hasil dari regresi data panel model *Common Effect Model* (CEM):

Tabel 4
Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model* (CEM)

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	825.1237	16.44764	0.0000
X1	3.19E-05	5.292710	0.0000
X2	0.000109	0.995846	0.3206
X3	-11.28622	-15.98064	0.0000
X4	0.053791	3.381347	0.0009
R-Square	: 0.636439		
F-statistik	: 80.96386		
Sig. (F-statistik)	: 0.000000		

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

2. Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan terdapat perbedaan intercept antar setiap individu, namun setiap intersep tidak berubah seiring berjalannya waktu. Maka dari itu koefisiensi atau slope pada masing-masing variabel sama untuk setiap individu dan antar waktunya. Berikut ini hasil estimasi regresi data panel menggunakan fixed effect model:

Tabel 5
Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	395.9616	3.714623	0.0003
X1	1.02E-05	2.047828	0.0423
X2	-0.000692	-4.083032	0.0001
X3	-3.757865	-2.319327	0.0217

X4	-0.009618	-2.739451	0.0069
R-Square	: 0.993414		
F-statistik	: 544.4639		
Prob. (F-statistik)	: 0.000000		

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

3. *Random Effect Model (REM)*

Model ini diasumsikan koefisien slope konstanta dan intercept berbeda antar individu dan antar waktu. merupakan hasil dari regresi data panel model *random effect ratio (REM)*:

Tabel 6
Hasil Regresi Data Panel *Random Effect Model (REM)*

Variabel	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	609.6792	8.378681	0.0000
X1	1.63E-05	4.472813	0.0000
X2	3.20E-05	0.334150	0.7386
X3	-7.411822	-6.683399	0.0000
X4	-0.004536	-1.338224	0.1825
R-Square	0.188411		
F-statistik	10.73700		
Sig. (F-statistik)	0.000000		

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

B. Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan pendekatan yang baik digunakan dalam penelitian. Uji ini membandingkan antara *common effect model (CEM)* dengan *fixed effect model (FEM)*. Uji ini dilakukan dengan ketentuan jika nilai $probability \geq 0,05$ maka model yang tepat digunakan yaitu *common effect model*, namun jika nilai $probability \leq 0,05$ maka model yang tepat digunakan yaitu *fixed effect model*. Hasil uji chow sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Chow

Effect Test	Probability
<i>Cross-section F</i>	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	0.0000

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Hasil dari Tabel 7 diatas menunjukkan nilai probability 0,0000 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka antara *common effect model* (CEM) dengan *fixed effect model* (FEM), lebih baik menggunakan metode estimasi *fixed effect model*.

2. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk menentukan pendekatan yang baik digunakan dalam penelitian. Uji ini membandingkan antara *fixed effect model* (FEM) dengan *random effect model* (REM). Uji ini dilakukan dengan ketentuan jika nilai probability $\geq 0,05$ maka model yang tepat digunakan yaitu *random effect model*, namun jika nilai probability $\leq 0,05$ maka model yang tepat digunakan yaitu *fixed effect model*. Berikut hasil uji hausman:

Tabel 8
Hasil Uji Hausman

Effect Test	Signifikansi
Cross-section random	0.0000

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

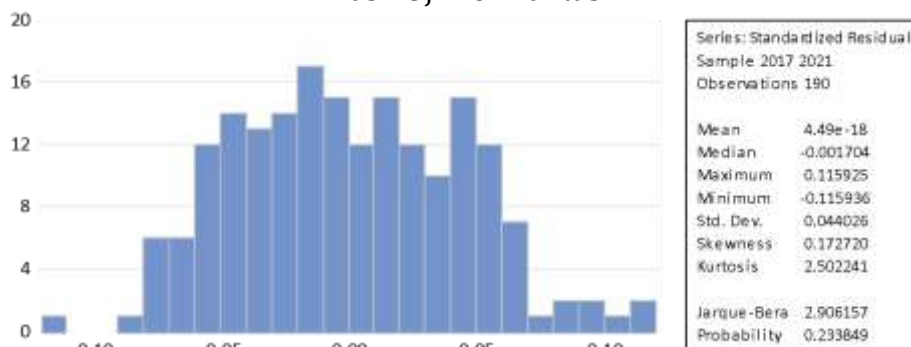
Hasil dari Tabel 8 diatas menunjukkan nilai probability 0,0000 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka model regresi data panel yang cocok digunakan yaitu *fixed effect model*. Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fixed effect model* (FEM) menjadi metode estimasi regresi data panel paling tepat yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini tidak perlu lagi untuk melakukan uji lagrange multiplier test.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai sebaran data yang terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data dalam penelitian ini dilihat dari grafik histogram dan uji Jarque-Bera. Data dapat dikatakan normal apabila memiliki nilai signifikansi Jarque Bera lebih besar dari 0,05. Berikut hasil ujinya:

Gambar 3
Hasil Uji Normalitas



Sumber: *Output Eviews 12*

Berdasarkan hasil uji normalitas dari Gambar 3 diatas, diketahui nilai probabilitas Jarque Bera sebesar $0,233849 > 0,05$. Maka dari itu data dalam penelitian ini dapat dikatakan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.)

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya persamaan dari variasi dari residual data observasi antara satu dengan lainnya. Sebuah data dapat dikatakan heteroskedastisitas apabila memiliki residual data yang bervariasi. Model regresi yang baik yaitu yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitasnya:

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.293161	Prob. F(4,185)	0.0611
Obs*R-squared	8.975528	Prob. Chi-Square(4)	0.0617
Scaled explained SS	8.845954	Prob. Chi-Square(4)	0.0651

Sumber: *Output Eviews 12*

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 9 diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas F $0.0611 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang berfungsi untuk mengukur hubungan keeratan antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Jika nilai koefisien korelasi menunjukkan hasil kurang dari 0,80, maka tidak teridentifikasi adanya multikolinearitas, begitu pula sebaliknya. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinearitas

	UM	PE	IPM	BM
UM	1.0000	0.6355	0.4324	0.3386
PE	0.6355	1.0000	0.40128	0.7987
IPM	0.4324	0.4012	1.0000	0.1649
BM	0.3386	0.7987	0.1649	1.0000

Sumber: *Output Eviews 121*, data diolah

Berdasarkan data dari Tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa nilai korelasi masing-masing variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan belanja modal kurang dari 0,80. Maka dapat

dikatakan bahwa antar variabel dalam model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas.

2. Uji Statistik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel metode *Fixed Effect Model* (FEM) dengan bantuan software Eviews 12 dalam pengelolaan data. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 11 Koefisien Regresi, Sig., F hitung, R Square

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
Konstanta (a)	394.9616	0.0003	
Upah Minimum (X ₁)	1.02E-05	0.0423	Positif, signifikan
Pertumbuhan ekonomi (X ₂)	-0.000692	0.0001	Negatif, signifikan
IPM (X ₃)	-3.757865	0.0217	Negatif, signifikan
Belanja modal (X ₄)	-0.009618	0.0069	Negatif, signifikan
F hitung	544.4639	0,0000	Ada pengaruh bersama-sama
R Square	0.993414		

Sumber: Output Eviews 12, diolah

Berdasarkan Tabel 11 diatas, maka model persamaan regresi data panel adalah:

$$Y = 395.9616 + (1.02E-05) \text{ Upah Minimum} + (-0.000692) \text{ Pertumbuhan Ekonomi} + (-3.757865) \text{ IPM} + (-0.009618) \text{ Belanja Modal}$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 395.9616 menunjukkan bahwa jika Upah minimum (X₁), pertumbuhan ekonomi (X₂), Indeks Pembangunan Manusia (X₃), dan belanja modal (X₄) bernilai nol (0) pada masing-masing variabel, maka jumlah kemiskinan (Y) akan sebesar 395.9616 ribu jiwa
- Koefisien regresi X₁ sebesar 0,0000102 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah nilai upah minimum akan menyebabkan peningkatan kemiskinan (bertanda positif) sebesar 0,0000102 persen, begitu pula sebaliknya.
- Koefisien regresi X₂ sebesar -0.000692 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah nilai pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan kemiskinan (bertanda negatif) sebesar 0.000692 persen, begitu pula sebaliknya.
- Koefisien regresi X₃ sebesar -3.757865 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) akan menyebabkan penurunan kemiskinan (bertanda negatif) sebesar 3,76 persen, begitu pula sebaliknya.
- Koefisien regresi X₄ sebesar -0.009618 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah nilai belanja modal akan menyebabkan penurunan kemiskinan (bertanda negatif) sebesar 0.009618 persen, begitu pula sebaliknya.

1. Uji T (Parsial)

Uji T yaitu pengujian yang dilakukan guna mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu bila Sig. > 0,05 (H_0 diterima) dan jika Sig. < 0,05 (H_0 ditolak). Rumusan Hipotesis

H_0 : Tidak ada pengaruh dari upah minimum secara individual terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021

H_1 : Ada pengaruh negatif signifikan dari upah minimum secara parsial terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021

a) Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi pengujian menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki koefisien positif sebesar 0,0000102 dan nilai Sig. 0,042 < 0,05 (H_0 diterima). Hal tersebut dapat dikatakan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021 ditolak.

Saat upah dalam pasar tenaga kerja mengalami kenaikan, perusahaan besar yang dilengkapi teknologi canggih cenderung mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. Hal tersebut akan berefek pada peningkatan pengangguran hingga terjadi peningkatan pada kemiskinan. Selain itu menurut data Badan Pusat Statistik, mayoritas penduduk Jawa Timur tahun 2021 sebesar 62,64% bekerja disektor informal. Banyaknya penawaran tenaga kerja di sektor informal ini menjadikan tingkat upah di sektor informal menurun dibawah upah minimum sehingga membuat pekerja hidup pas-pasan terbatas bahkan kurang mampu untuk memenuhi semua kebutuhan hidup layak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Islami dan Anis, yang juga menemukan pengaruh positif antara upah minimum dan kemiskinan.¹⁸ Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari,¹⁹ dan S. Hanifah dan N. Hanifa, dimana penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.²⁰

b) Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi pengujian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki koefisien negatif sebesar 0,000692 dan nilai Sig. 0,0001 <

¹⁸ N. Islami & A. Anis, *Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia* (Jurnal Ilmu Ekonomi, 2019), 1.

¹⁹ Y. A. Sari, *Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah* (Equilibrium, 2021), 10.

²⁰ S. Hanifah & N. Hanifa, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan* (Independent: Journal of Economics, 2021), 1.

0,05 (H_0 ditolak). Hal tersebut dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021 diterima.

Hal ini sesuai dengan teori *trickle down effect* yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan diikuti aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Peningkatan jumlah barang dan jasa yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi, membuat perusahaan membutuhkan semakin banyak tenaga kerja. Terserapnya tenaga kerja akan mampu mengurangi pengangguran serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut jika berlangsung terus menerus maka akan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nainggolan,²¹ yang memberikan hasil pertumbuhan ekonomi secara individual berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian Susanto²² dan Parinusa,²³ menunjukkan hasil yang searah dengan penelitian ini yang mana pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi pengujian menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki koefisien negatif sebesar 3,757865 dan nilai Sig. 0,0217 < 0,05 (H_0 ditolak). Hal tersebut dapat dikatakan IPM memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021. Maka hipotesis yang menyatakan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021 diterima.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori dimana peningkatan IPM akan memberikan pengaruh kepada pengurangan kemiskinan. Sebagian besar Kabupaten\Kota di Jawa Timur memiliki angka IPM di atas 70 yang mengindikasikan bahwa tingkat pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur rata-rata sudah tinggi. Tingkat pendidikan yang baik akan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian dalam menyerap teknologi baru. Kesehatan juga memiliki andil yang besar dalam keberlangsungan dan peningkatan produktivitas. Karena dengan badan yang sehat, seseorang bisa melakukan aktivitas pekerjaan untuk mencapai tujuannya.

Penelitian ini searah dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyoningrum dan Sukmawatizz, yang juga menunjukkan pengaruh

²¹ E. Nainggolan, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara 2010-2019* (Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya, 2020), 5.

²² R. Susanto & I. Pangesti, *Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia* (Journal of Applied Business and Economics, 2020), 7.

²³ S. M. Parinusa & D. E. Waimbo, *Analisis Destruminasi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2019* (Jurnal Lensa Ekonomi, 2020), 11.

IPM terhadap kemiskinan memiliki hasil negatif signifikan.²⁴ Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani,²⁵ dan Alhudori,²⁶ yang menunjukkan IPM berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

d) Belanja Modal Terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi pengujian menunjukkan bahwa variabel belanja modal memiliki koefisien negatif sebesar 0,009618 dan nilai Sig. $0,0069 < 0,05$ (H_0 ditolak). Hal tersebut dapat dikatakan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021 diterima.

Hasil tersebut tidak sejalan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) yang menghasilkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di BKI Jakarta secara langsung.²⁷ Begitupun Rusdarti²⁸ dan Kotambunan,²⁹ yang memberikan hasil belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sendouw yang memberikan hasil belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.³⁰

2. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen dalam model terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pada tabel 11 diperoleh F_{hitung} sebesar 544,4639 dengan F_{tabel} 2,66 (diperoleh dari (4; 38-4-1) sama dengan (4;33), maka $544,4639 > 2,66$. Sedangkan nilai signifikansi 0,00 yang menunjukkan bahwa $0,00 < 0,05$. Dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum,

²⁴ A. K. Prasetyoningrum & U. S. Sukmawatizz, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia* (Jurnal Ekonomi Syariah, 2018), 6.

²⁵ N. Handayani, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019* (Universitas Diponegoro, 2021), 134-140.

²⁶ M. Alhudori, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi* (Economics: Journal of Economics and Business, 2017), 1.

²⁷ Rahmawati, 2018, 45.

²⁸ L. K. Rusdarti & Sebayang, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah* (Jurnal Economia, 2013), 9.

²⁹ L. Kotambunan, W. S. Palar, & L. R. Tumilar, *Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan IPM Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Dalam Tahun 2005-2014* (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 2016), 16.

³⁰ D. C. Sendouw, A. Rumate, A.V., & Rotinsulu, *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado* (Mando: Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2017), 18.

pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh suatu variabel bebas (X) terhadap variabel terikatnya (Y). Pada tabel 6 didapatkan *R Square* sebesar 0.993414. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari upah minimum, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja modal mampu mempengaruhi variabel dependen kemiskinan sebesar 99,3%. Sedangkan 0,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upah minimum secara parsial/individual berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021. Sedangkan IPM, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal mampu memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021. Kemudian variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil tersebut pemerintah hendaknya memberdayakan berbagai program pelatihan kewirausahaan yang berfungsi untuk meningkatkan skill masyarakat hingga meningkatkan pendapatan. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan yang mana termasuk komponen IPM yang memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel baru yang diduga memberikan pengaruh langsung terhadap kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhudori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1.
- Ariadi, W. (2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Dan Analisis*. Deepublish.
- Budhijana, R. B. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Perbankan*, 5.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba.

- Handayani, N. (2021). Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. Universitas Diponegoro.
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent:Journalof Economics*, 1.
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1.
- Kahar, A. (2022). Beasiswa Pemutus Mata Rantai Kemiskinan. Indonesia Emas Group.
- Kotambunan, L., Palar, S. W., & Tumilaar, R. L. . (2016). Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.
- Nainggolan, E. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019). *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya*, 5.
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambitahun 2009-2013. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 2.
- Parinusa, S. M., & Waimbo, D. E. (2020). Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2019. *Jurnal Lensa Ekonomi*, 11.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawatizz, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekkonomi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.
- Pudjiyanto, B., & Syawi, M. (2015). Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. *Sosio Informa*, 1.
- Rusdarti, & Sebayang, L. K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provunsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, 9.
- Safira, Djohan, S., & Nurjanana. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 21.
- Sari, Y. A. (2021). . Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10.
- Sendouw, A.Rumate, A. V., & Rotinsulu, D. C. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18.

- Sukirno, S. (2016). Makroekonomi. PT Rajagrafindo Persada.
- Sungkar, S. N., Nazamuddin, & Nasir, M. (2015). , Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2020). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics*, 7.
- Wiryawan, W. G. (2015). Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata. *Media Nusa Creative*.
- Yanthi, C. I. D. P., & A.A.I.N., M. (2015). Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah, Dan Pengangguran Terhadap Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Piramida: Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 11.